

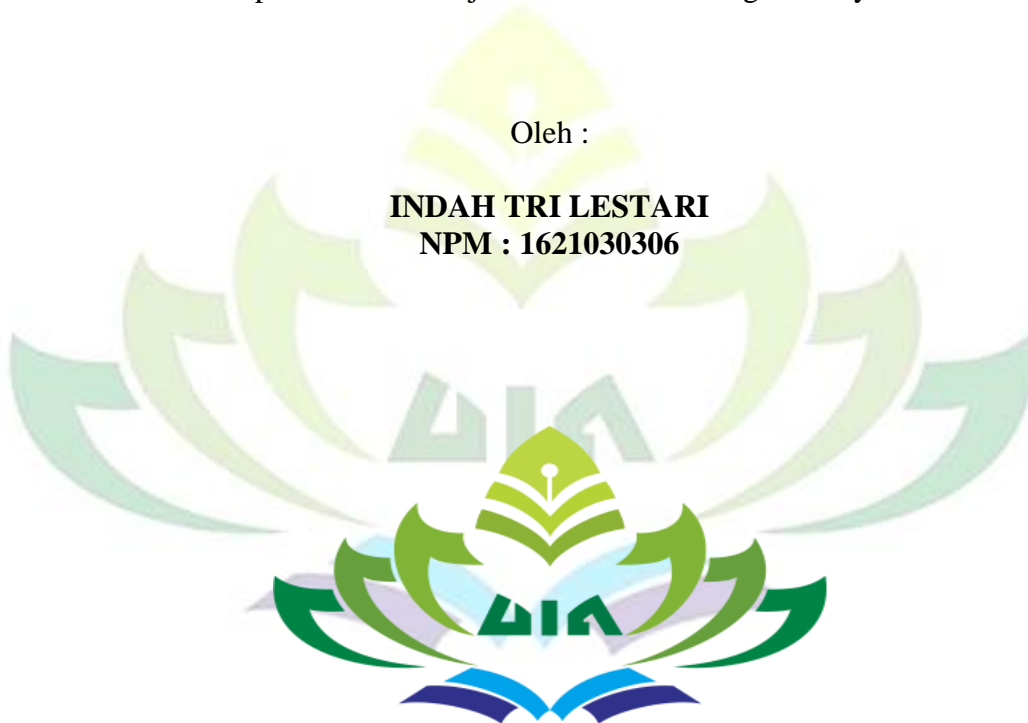
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UTANG PIUTANG MELALUI
APLIKASI KREDIT PINTAR DENGAN POTONGAN DAN DENDA
SECARA SEPIHAK
(Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden
Intan Lampung Angkatan 2016)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Bidang Ilmu Syariah

Oleh :

**INDAH TRI LESTARI
NPM : 1621030306**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UTANG PIUTANG MELALUI
APLIKASI KREDIT PINTAR DENGAN POTONGAN DAN DENDA
SECARA SEPIHAK
(Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden
Intan Lampung Angkatan 2016)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Bidang Ilmu Syariah

Oleh :

INDAH TRI LESTARI

NPM : 1621030306

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A

Pembimbing II : Muslim, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Melalui Aplikasi Kredit Pintar Dengan Potongan Dan Denda Secara Sepihak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2016)”.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah Pengertian tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia bisa berarti: hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Devinisi tinjauan menurut Achmad Elqorni adalah sebagai berikut: peninjauan kembali (*review*) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi.¹

¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 198.

2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²
3. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang di utangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.³
4. Aplikasi Kredit Pintar adalah pinjaman jangka pendek berbasis aplikasi *smartphone* dengan plafon dari Rp 600.000 hingga Rp 8.000.000.⁴
5. Potongan Dan Denda Secara Sepihak diartikan sebagai pengurangan (tentang, gaji, upah dan sebagainya).⁵ Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya).⁶ Sepihak adalah satu pihak (sisi); sebelah; sebelah pihak; pembatalan.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk meninjau terhadap praktek utang piutang aplikasi kredit pintar dengan potongan dan denda secara sepihak.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2014), h. 5

³ Khumedi Ja'far *Hukum Perdata Di Indonesia* (Bandar lampung Permatanet Publishing, 2016), h.123.

⁴ <https://www.online-pajak.com/pinjaman-online> (diakses pada 22 oktober 2019, pukul 09.00).

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 35.

⁶ *Ibid*, h. 10.

⁷ *Ibid*, h. 950.

B. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang ini praktik utang piutang terjadi di perbankan atau lembaga Islam dan juga terjadi melalui media *online* di berbagai macam aplikasi saat ini sangat menjamur dan berkembang. Diantara aplikasi yang menawarkan utang yaitu Kredit Pintar, Dana Rupiah, Pinjaman Uang Kilat, Tunai Kita, Pinjam Yuk dan masih banyak lagi. Dalam utang piutang melalui media online ini, fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dan pinjaman uang langsung cair dengan jaminan yang sangat mudah merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Adanya kejanggalan mengenai utang piutang di sebuah aplikasi melalui media *online* ini hampir semuanya sama.

Aplikasi Kredit Pintar yaitu pinjaman jangka pendek berbasis aplikasi *smartphone* dengan adanya minimal dan maksimal pinjaman. Jangka waktu kredit online dapat ditentukan sesuai dengan keinginan peminjam, dengan durasi terlama 1 tahun.⁸ Untuk mendapatkan Kredit Pintar anda tidak perlu menyediakan jaminan ataupun harus memiliki kartu kredit sebelumnya. Dengan persyaratan yang mudah dan tersedia di seluruh Indonesia, anda dapat meringankan beban keuangan dalam waktu singkat. Seiring berkembangnya kegiatan utang piutang, terkadang dalam potongan dan denda pinjaman kerap menimbulkan beberapa komplain dari pengguna aplikasi kredit pintar/peminjam terkait ketidak sesuaian uang yang dipinjam, hal ini

⁸ Wawancara Muhammad Iqbal sebagai peminjam dana di aplikasi kredit pintar pada tanggal 23 oktober 2019.

membuat peminjam merasa dirugikan karena ketidakpuasan dalam meminjam uang di aplikasi kredit pintar. Para peminjam komplain namun pihak kredit pintar tak kunjung menanggapi. Mungkin memang sangat mudah sekali meminjam uang melalui *online*, terdapat kejanggalan di dalam pinjaman ini dan itu merupakan masalah bagi peminjam. Terjadinya potongan dan denda secara sepihak dalam pinjaman membuat peminjam merasa keberatan sebab uang yang kita pinjam tidak sesuai dengan nominalnya yang ditransfer terdapat potongan dari uang yang dipinjam, pinjam Rp.600.000 ditranfer Rp.540.000. Dan begitupun dengan denda yang cukup besar yaitu senilai 1.35% sampai 15% perharinya.⁹ Denda merupakan sanksi bagi peminjam uang, namun denda yang diberikan pada pinjaman ini cukup memberatkan para peminjam karena lebih besar denda yang dipinjam daripada uang yang dipinjam.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁰ Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.¹¹

⁹ Wawancara Iqbal sebagai peminjam dana di aplikasi kredit pintar pada tanggal 23 oktober 2019.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen* (Universitas: Brawijaya Press, 2015),h.42.

Adapun yang dijadikan dasar hukum untuk mendasari kegiatan pinjam-meminjam dapat kita temukan didalam Al Quran Surah Al Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ...

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa” (QS: Al Maidah(5):2).¹²

Berdasarkan ayat di atas manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti memerlukan bantuan orang lain dalam hal apapun. Dalam hadist juga dijelaskan bahwa : Allah SWT akan menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya (orang lain). Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)¹³
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ

“Allah SWT senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya”(HR. Muslim)

Adapun hukum bagi orang yang berutang adalah boleh (mubah). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberi utang adalah Sunnah, bahkan wajib terhadap orang yang sangat membutuhkan dan bagi orang yang berutang hukumnya boleh bahkan haram apabila dipergunakan untuk maksiat.

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Syama, 2009), h.106.

¹³ Abu Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor Hadist 1206, Maktabah Kutub

Sebagai upaya agar usaha yang dilakukan itu tidak lepas dari rida Allah SWT, maka dalam berniaga atau bertransaksi pinjam-meminjam tidak lepas pula dari norma-norma hukum Islam dengan memegang teguh rukun dan syarat-syaratnya. Pinjam-meminjam yang didasari oleh nilai-nilai kebaikan ini diharapkan mampu menghandirkan kemashlahatan bagi seluruh umat manusia khususnya bagi umat beragama Islam.

Pernyataan diatas terdapat kejanggalan, yakni potongan pinjaman yang tidak jelas dan denda yang memberatkan peminjam online. Sehingga peminjam merasa keberatan dalam meminjam uang, sehingga perlu diungkap lebih jelas, lebih rinci dan lengkap serta apa fungsi dan tujuan adanya potongan dan denda pinjaman tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Melalui Kredit Pintar Dengan Potongan dan Denda Secara Sepihak”. (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2016).

C. Fokus Penelitian dan sub-Fokus Penelitian

Utang Piutang merupakan bagian dari muamalah yang ruang lingkupnya sangat luas, maka dalam penelitian ini perlu dibatasi fokus masalahnya di sekitar praktik potongan dan denda utang piutang melalui kredit pintar, yang kemudian akan dilihat dari tinjauan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapat beberapa pokok masalah yang hendak dikembangkan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik utang piutang melalui aplikasi kredit pintar dengan potongan dan denda secara sepihak pada mahasiswa jurusan muamalah angkatan 2016 UIN Raden Intan Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang utang piutang melalui aplikasi kredit pintar dengan potongan dan denda secara sepihak pada mahasiswa jurusan muamalah angkatan 2016 UIN Raden Intan Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik utang piutang melalui aplikasi kredit pintar dengan potongan dan denda secara sepihak pada mahasiswa jurusan muamalah angkatan 2016 UIN Raden Intan Lampung .
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang utang piutang melalui aplikasi kredit pintar dengan potongan dan denda secara sepihak pada mahasiswa jurusan muamalah angkatan 2016 UIN Raden Intan Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam tataran teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas sebagai berikut:

1. Secara Teoritis dan akademis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran ke

Islaman Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, terutama dalam memenuhi salah satu syarat dan tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama adalah penelitian oleh Dewi, A, NPM : 1321030114 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang pembayaran utang dengan tenaga”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan Praktik pembyaran utang dengan tenaga di Dusun Borobudur di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah Muqtaridh dengan sebelumnya tidak ada akad atau perjanjian bersama akan mengembalikannya dengan tenaga. Namun karena Muqridh adalah saudara ataupun tetangga sendiri maka dari itu Muqridh memiliki rasa kemanusiaan dengan mentolerir kesusahan Muqtaridh tersebut, dan menerimanya bekerja menggunakan tenaga di tempat Muqridh, yang

mana menurut hukum Islam dapat dikatakan diperbolehkan (Mubah). Dalam pembayaran hutang piutang tersebut juga tidak ada sarat tambahan dalam pembayarannya namun pembayaran hutang dengan tenaga harus seimbang antara nilai tenaga yang dikeluarkan dengan jumlah hutang yang dipinjam dan juga para pihak yang bersangkutan sama sama ikhlas.

Penelitian yang kedua adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek Hutang Piutang Bersyarat” studi kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang. Oleh Andriyani, A, NPM: 1321030168. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa Utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur datang kepada seorang (kreditur) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan syarat debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Syarat ini mampu disetujui oleh debitur dan kemudian pada waktunya hutang piutang itu diselesaikan menurut kesepakatan kedua belah pihak ketika hutang piutang terjadi. Menurut hukum Islam membolehkan pelaksanaan Al-Qardul Hasan atau hutang-piutang bersyarat, tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan harta yang dapat dipinjamkan. Para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan harta yang bisa ditakar, ditimbang ataupun makanan. Berdasarkan hasil penelitian hutang piutang tidak bertentangan oleh hukum Islam.

Kedua penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah letak obyek kajiannya. Kedua penelitian diatas membahas tentang pembahasan hutang bersyarat dan pembayaran dengan tenaga. Adapun kesamaan dari penelitian ini adalah perubahan objek yang dilakukan pada transaksi hutang piutang ini.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdapat 2 macam metode yakni metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pertama, metode kualitatif yaitu menggunakan metode wawancara atau observasi secara mendalam ke subjek penelitiannya. Kedua, metode kuantitatif yaitu metode yang menggunakan survei atau kuesioner yang disebar ke subjek penelitian sebagai metode penelitiannya.¹⁴

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Alasannya, karena metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris lebih relevan dalam mengolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan langkah yang sistematis.

Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu suatu penelitian yang pengumpulan datanya di ambil dari lokasi atau lapangan.¹⁵ Penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi yaitu di

¹⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2007), h. 60.

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*(Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 81.

jurusan muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung angkatan 2016. Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, sedangkan untuk data sekunder penulis mencarinya dari buku-buku *fiqih* dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.¹⁶

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta secara objektif, baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.

a. Data Primer

Data primer yaitu suatu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari objek penelitian atau responden.¹⁷ Adapun data penelitian ini yang diperoleh dari responden langsung para mahasiswa pengguna aplikasi kredit pintar di jurusan muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung angkatan 2016.

¹⁶ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005), h.58.

¹⁷ Muhamad Pambundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 4.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain. Berupa data yang diperoleh dari beberapa buku dan wawancara dengan mahasiswa Jurusan Muamalah angkatan 2016 yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

3. Populasi

Populasi adalah “Keseluruhan dari Subjek penelitian.” Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua liku-liku yang ada di dalam populasi.¹⁹

Berdasarkan pernyataan dari Suharsimi Arikunto, apabila populasi terdiri dari 100 orang maka dapat diambil 10-15%. Sedangkan jika populasi kurang dari 100 orang maka menjadi penelitian populasi.²⁰ Dalam penelitian ini populasi terdiri dari 5 orang yaitu, 4 orang mahasiswa dan 1 orang *customer service* kredit pintar. Jadi penelitian ini adalah penelitian populasi, mengingat sumber data yang digunakan tidak dalam rangka mewakili populasi yang ada tetapi lebih cenderung mewakili informasi dan karakteristik.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2000), h. 142.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), h.96.

²⁰ Moh Pabunda Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2000), h.33.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan dan penginderaan.²¹ Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mengamati langsung praktik utang piutang melalui aplikasi kredit pintar dengan potongan dan denda secara sepihak pada mahasiswa jurusan muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung angkatan 2016.

b. Wawancara

Wawancara adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau pertanyaan secara langsung untuk mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan utang piutang tidak atas dasar potongan dan denda yang terjadi di Aplikasi Kredit Pintar. Hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.²²

²¹*Ibid* h.227.

²²*Ibid* h. 137.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya.²³ Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian utang piutang melalui aplikasi kredit pintar.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. *Editing*

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan editing yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses *Editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.²⁴

b. *Coding*

Pemberian tanda kata yang diperoleh berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukan

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka-Cipta, 1993), h.82.

kelompok atau golongan tertentu atau klasifikasi berdasarkan jenisnya.²⁵

c. Sistematis

Sistematika data yaitu bertujuan untuk merapihkan dan menempatkan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan, atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²⁶

6. Metode Analisa Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan baik melalui metode kepustakaan maupun metode lapangan dan sesuai dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Melalui Aplikasi Kredit Pintar Dengan Potongan Dan Denda Secara Sepihak.

Kemudian diolah secara sistematis, dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku, yang dapat dimengerti dan menggunakan pendekatan pemikiran induktif yaitu yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan mengenai fenomena yang di teliti.

²⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.24.

²⁶*Ibid*, h.103.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang masalah, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup studi, sistematika penulisan dan kerangka berfikir.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan landasan terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai utang piutang, riba, potongan dan denda serta aplikasi kredit pintar.

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian dan deskripsi data penelitian.

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa mengenai hasil tersebut.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan sasaran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang Dalam Islam

1. Pengertian Utang Piutang (*QARDH*)

Dalam Islam utang piutang dikenal dengan istilah *al-qardh*, *Qardh* dikalangan ahli bahasa didefinisikan sebagai memotong.¹ *Qardh* berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit, yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Secara etimologi, *qardh* berarti potongan harta yang dibayarkan kepada muqtaridh dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang membayar).²

Dengan demikian *al-qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan utang.³

Utang piutang yaitu memberikan sesuat kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.⁴

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.167.

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.229.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.151.

⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatane

Jika ada tambahan waktu mengembalikan utang itu lebih dari jumlah semestinya harus diterima, dan tambahan itu telah menjadi perjanjian sewaktu akad maka tambahan dari jumlah yang semestinya, tidak halal atas piutang mengambilnya.⁵

Adapun utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya gantinya dikemudian hari.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁷

Pengertian utang piutang sama dengan pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi : “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa

Publishing, 2016), h.123.

⁵ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 1978), h.414.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 2012), h.178.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.689.

⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h.451.

yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁸

Al-Bahuti mendefinisikan *qardh* secara etimologi adalah potongan, adapun secara terminologi adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.⁹

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikannya secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkannya. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.¹⁰

Adapun utang piutang menurut para ahli fiqh yaitu :

Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.¹⁰ *Qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.168.

¹⁰ *Ibid*, h.169.

Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa utang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Selain itu akad dari utang piutang sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan ijab dan qabul untuk memenuhi suatu unsur yang harus ada dalam sebuah akad.¹¹ Maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya.¹² *Qardh* juga tidak berbunga karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan

¹¹ Chairuman Pasaribu, Suhawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.136.

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.169.

Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Qs. Al-Baqarah : 245)¹³

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang harus di dasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa Allah merupakan amal saleh dan memberi infaq *fisabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasan yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar dapat gantinya.¹⁴

Mempiutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolongnya. Al-Khazin dalam menafsirkan surat Al-Maidah diatas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan artinya “bertolong-menolonglah dalam upaya melakukan kebaikan dan ketakwaan” kebaikan ini menurut Ibn „Abbas maksudnya “mengikuti al-sunnah” sedangkan pengertian dari janganlah kamu dalam tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan, maksudnya “jangan bertolong menolong dalam kekafiran dan kedzoliman”.¹⁵

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h.222.

¹⁵ Mohammad Rusfi “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”, *Al-„Adalah* vol 13 no 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syari‘ah UIN Raden Intan Lampung, 2016) h.254. (online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519> (10 oktober 2019, pukul 20:30 WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Prinsip ini mesti mewarnai seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum. Artinya dalam pembentukan materi hukum haruslah mengacu kepada prinsip ini, dalam arti ketetapan yang dibuat haruslah mengacu kepada prinsip ini, dalam arti ketetapan yang harus mencerminkan sikap tolong menolong antar umat manusia dalam rangka mencapai kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Namun harus menghindari tolong menolong dalam hal keburukan apalagi tolong menolong itu akan pengaruh kepada kefakiran atau penyimpangan dari ketentuan Allah.¹⁶

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Landasan hukum disyariatkannya qardh berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijma.

1. Landasan berdasarkan Al-Qur'an adalah :

1). Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاغْفِرْ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami,

¹⁶ Ibid, h.254.

janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."(Qs. Al-Baqarah : 286)¹⁷

Pemberian utang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama manusia dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangan dalam melakukannya. Pentingnya orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memberi pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan pinjaman.

Maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal utang piutang ataupun lainnya selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

2). Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 12 :

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْهُمْ فَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٨﴾

“Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik[406] Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (Qs: Al-Maidah : 12)¹⁸

2. Landasan dari Al-Sunnah antara lain adalah :

1). Hadis riwayat Ibnu Masud :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ
كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

“Dari ibnu mas‘ud, sesungguhnya nabi Muhammad saw. Bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali”.¹⁹

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang piutang) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadis tersebut bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

¹⁹ Abu Abdullah Bin Yazid Al-Quzwaini Ibnu Maah, *Sunan Ibni Majah*, (Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005), VII/378, hadis nomor 2524.

satu kali. Hal ini berarti bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

2). Hadis riwayat Anas Bin Malik :

بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ أَنَسٍ

عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَمَكَتُ بِأَلِ الصَّدَقَةِ
رَأَيْتُ أُسْرِيَ بِي
وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ
بِعَشْرِ لَهَا أَمْثَلًا
ضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ لِأَنْقَالَ السَّائِلَ
يَلْ مَا بَالُ الْقَرْضِ
وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرَضُ لَا قَرِيسَتَ ضِ إِلَّا مَنْ
يَسْأَلُ

ابن ماجه²⁰

حَاجَةٌ (رواه

“Dari anas bin malik ia berkata, rasulullah saw. Bersabda: saat malam isra mi'raj aku melihat dipintu surge tertulis, sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan *qardh* (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali; aku bertanya kepada jibril, wahai jibril kenapa *qard* lebih utama daripada sedekah?” jibril menjawab, karena didalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan”(HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis diatas, utang piutang merupakan suatu bentuk akad yang disyariatkan hukum islam dengan melonggarkan kesempitan

²⁰ Ibid, VII/379, hadis nomor 2525.

hidupnya, hal ini merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Hal ini secara otomatis merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, apabila dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam tersebut.

3. Rukun Dan Syarat Utang Piutang

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar'î dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.²¹

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu *qardh* pun di pandang sah setelah adanya ijan dan qabul, seperti jual beli dan hibah. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah.

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri.²²

a. Rukun *Qardh*

²¹ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1510.

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.160.

Menurut ulama hanafiyah adalah ijab dan Kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun qardh ada tiga, yaitu :

- a). Dua orang yang berakad yang terdiri dari : muqaridh (yang memberikan utang) dan muqtaridh (orang yang berutang).
- b). *Qardh* (barang yang dipinjamkan).
- c). Sighat ijab dan kabul.

b. Syarat *Qardh* :

- a) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (muqtaridh) dan orang yang memberikan pinjaman (muqaridh), disyaratkan :
 - 1). Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.²³
 - 2). Muqaridh adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tabarru'. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah (kecakapan atau kepantasan) pada akad qardh harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama hanabilah merinci syarat ahliyah at-tabarru' bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta

²³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.232

orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.²⁴

b). Harta yang diutangkan (*qardh*)²⁵

- 1). Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (makilat), harta yang dapat ditimbang (mauzunat), harta yang diukur (zariyyat), harta yang dapat dihitung (addiyat). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- 2). Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta makilat, mauzunat, addiyat. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- 3). Al-Qabad atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad qardh ada tabarru". Akad tabarru" tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
- 4). Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orangyang mengutangkan).
- 5). Utang itu menjadi tanggung jawab muqtarid (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.

²⁴ *Ibid*, h.232

²⁵ *Ibid*, h.233.

- 6). Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqawwim*).
- 7). Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- 8). Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qardh* selain dari perkara diatas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *qardh* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadist dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukarkan (*qardh*) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang bisa ditakar, atau ditimbang. menatap ditanah, dan lain-lain.²⁶

Jumhur ulama membolehkan, *qardh* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qardh* manfaat seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya

²⁶ Al-Huskafi, Juz IV, h.179.

teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi ibn taimiyah memperbolehkannya.²⁷

a. *Shighat ijab* dan Kabul

Menurut ulama Hanafiyah, ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhoan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sedangkan, qabul adalah orang yang berkata setelah mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhoan atas orang pertama.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.²⁸

Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara". Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syariat Islaam.²⁹ Dan akad ijab qabul di dalam online sekarang sudah banyak yang melalui aplikasi tidak harus bertatap muka, karena setelah mengisi

²⁷ *Ibid*, h.181

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.46.

²⁹ *Ibid*, h.45.

persyaratan itu sudah termasuk ijab qabul antara si nasabah dengan perusahaan maka dapat dikatakan sah.

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan Kabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula Kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridho” dan lain sebagainya.³⁰

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqaridh* (orang yang mnegutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba, seperti yang telah dijelaskan dalam hadist Nabi diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi SAW, sesungguhnya nabi berkata: “semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”.³¹

Jika tidak di syaratkan dan tidak ditemukan ada tambahan dalam pembayaran utang piutang, tidak termasuk riba. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihkan pembayaran utangnya merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa seorang laki-laki telah menagih piutangnya kepada

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h. 233

³¹ Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra, Juz 2*, Majelis Dairah Al-Maarif Al-Nizhamiyah 1334 H), h.72, hadis ke-11252.

Nabi SAW di hadapan sahabat. Kemudian, Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk membayar dengan yang sama. Sahabat menyatakan, tidak ada kecuali nilainya lebih dari yang diutangkan.

Adapun yang menjadi objek rukun dan syarat utang piutang itu sendiri adalah :

1). Aqid yaitu Kreditur dan Debitur

Orang yang berutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan utang piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut ulama Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk kreditur yaitu ahliyah (kecakapan untuk melakukan tabarru dan mukhtar (memiliki pilihan). Sedangkan untuk debitur disyaratkan harus memiliki ahliyah (kecakapan) untuk melakukan muamalat, seperti baliqh, berakal dan tidak mahjur'alaih.³²

Sementara dalam fiqh Sunnah disebut bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (memilih) tidak sah, dan keabsahannya tergantung pada izin walinya.

³² Chairuman Pasaribu, Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.136.

Selain itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

2). *Ma''qud''alaih* yaitu uang atau barang

Selain adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang, maka perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan diutangkan. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a). Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- b). Dapat dimiliki.
- c). Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.
- d). Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

Perjanjian utang piutang disyariatkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan atau lupa, baik mengenai besar kecilnya utang atau waktu pembayarannya.³³

Al-Zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qardh*. Pertama, *qardh* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat

³³ *Ibid*, H. 137.

bagi pihak yang meminjamkan. Kedua, akad *qardh* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.³⁴

Pasal 612 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam *qardh* pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu untuk mengembalikan.

Ketentuan lain adalah pasal 614 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qardh*, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman.³⁵

Berbagai syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan diatas harus terpenuhi saat akad *qardh*. Sah atau tidak sah nya suatu akad tergantung terpenuhi rukun, syarat dan ketentuan yang berlaku.³⁶

Perbedaannya lagi dalam khiyar dan penangguhan, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam *qardh* tidak ada khiyar sebab maksud dari khiyar adalah membatalkan akad, sedangkan dalam *qardh* masing-masing berhak boleh membatalkan akad kapan saja dia mau. Jumhur ulama melarang penangguhan

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami*, V/3792.

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.172.

³⁶ *Ibid*, h.173.

pembayaran qardh sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasi'ah*. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *qardh* adalah derma, *muqridh* berhak meminta penggantinya waktu itu. Selain itu, *qardh* pun termasuk akad yang wajib diganti dengan harta mitsil, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak. Namun demikian, ulama Hanafiyah menetapkan keharusan untuk menanggihkan qardh pada empat keadaan³⁷ :

- 1). *Wasiat*, seperti mewasiatkan untuk penangguhan sejumlah harta dan ditanggihkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantinya dari muqtarid sebelum habis waktu setahun.
- 2). *Diasingkan*, *qardh* diasingkan kemudian pemiliknya menanggihkan nya sebab penangguhan pada waktu itu diharuskan.
- 3). Berdasarkan keputusan hakim.
- 4). *Hiwalah*, yaitu pemindahan utang.

4. Waktu dan Sistem Pembayaran Utang Piutang dalam Islam

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal iya mampu

³⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.154

untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.³⁸

1). Hukum Menunda Pembayaran Utang

Hukum menunda pembayaran utang dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- a). Hukum menunda pembayaran utang adalah haram. Jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki *udzur* yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo.
- b). Hukum menunda pembayaran utang adalah mubah, apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, misal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau enggan membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipuan dalam berbisnis (bermuamalah).

2). Dampak negatif utang piutang

³⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.127.

Utang dapat berakibat buruk bagi melakukannya. Diantara akibat buruk itu adalah sebagai berikut :

- a). Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan utang pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang.
- b). Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang berutang menjadi malu.
- c). Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberikan utang. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus.
- d). Jika utang seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bias dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan utang.
- e). Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya demi untuk membayar utangnya tersebut.³⁹

3). Faktor pendorong melakukan utang

³⁹ *Ibid*, h.128

Dalam hal ini ada beberapa factor yang mendorong seseorang berutang, antara lain ⁴⁰:

- a). Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
- b). Kebiasaan berutang, sehingga kalau utangnya sudah lunas rasanya tidak enak kalau tidak utang lagi.
- c). Karena kalah judi, sehingga ia berutang untuk segera membayar kekalahannya.
- d). Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya.
- e). Untuk dipuji orang lain, sehingga berutang demi memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).

4). Etika dalam utang piutang

Sebagian dari kita mengalami masa sulit ekonomi dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satunya dengan meminta tolong dipinjamkan uang (utang), dan akan mengganti uang tersebut pada jangka waktu tertentu. Namun tidak semua orang tahu peraturan tidak tertulis atau etika baik dalam utang piutang di masyarakat. ⁴¹

Adapun etika baik dalam utang piutang sebagai berikut ⁴²:

⁴⁰ *Ibid*, h.129.

⁴¹ M Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.243.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.98.

- a). Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- b). Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.
- c). Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang laki-laki atau dengan seseorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.
- d). Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan apabila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
- e). Pihak yang berutang apabila mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaklah mempercepat membayar utangnya sebab sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang artinya “melalaikan dalam membayar pinjaman atau utang, berarti ia telah berbuat

dzalim kepada pemberi pinjaman atau utang padahal ia telah menolongnya.

5). Berakhirnya perjanjian dalam utang piutang

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi utangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berhutang wajib menyegerakan melunasi utangnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-israa ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”. (Qs. Al-Isaraa: 34)

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggung jawaban baik di dunia maupun di akhirat. Mengenai masalah utang piutang maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu :

a). Pemberian perpanjangan waktu pelunasan utang

Apabila kondisi orang yang berhutang sedang berada didalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang

dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Qs: Al-Baqarah : 280)⁴³

Adapun hukum utang piutang itu sendiri asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam keadaan darurat dengan catatan dia mampu untuk melunasi utangnya tersebut. Dan wajib hukumnya berutang jika dalam keadaan darurat, missal jika berutang maka dia akan meninggal dunia, dan menjadi haram jika tidak dalam keadaan darurat dan diyakini tidak mampu melunasi hutangnya tersebut.⁴⁴

b). Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, utang piutang baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia

⁴³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et. al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 253

wajin mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama(*misli*), bukan uang yang diterimanya.

c). Melebihkan Pembayaran

Melebihkan pembayaran dari jumlah utang yang diterima menjadi dua macam yaitu kelebihan yang tidak diperjanjikan dan kelebihan yang diperjanjikan.

Akad *qardh* termasuk ke dalam akad tabarru", karena didalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, muqridh berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, nabi telah mengajurkan agar seseorang menyegerakan pembayaran utangnya. Karena menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, termasuk kedzaliman.

Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad, dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *qardh* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berkad atau dari pihak yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Dari arti diatas, menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴⁵

Apabila seseorang tidak mampu membayar utangnya, disunatkan terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan kepada orang tersebut karena memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah swt pada hari kiamat.

Jika seseorang menukarkan (*iqtaradha*) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis gandum kepada *muqridh* yang meminta zatnya. Jika *muqridh* tidak memintanya, *muqtaridh* tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun *qarad* (barang yang

⁴⁵ Rachmawati, Eka Nuraini. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia.” *Al-Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2015) h.786. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> 10 oktober 2019, pukul 21:00WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, *muqtaridh* tidak memiliki qarad selama qarad masih ada. Pengembalian qarad pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat. Pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad qarad. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati qarad pada sifatnya.

5. Akad Yang Dilarang Dalam Hutang Piutang

Perlu diketahui dalam suatu akad hutang piutang ada beberapa tindakan yang dilarang oleh Allah yaitu *Gharar* Dan *Riba* kedua hal tersebut sangat dibenci dalam islam, karna kedua hal tersebut mencerminkan hal yang buruk antara hamba allah.

1). Gharar

a). Pengertian *gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.⁴⁶ Suatu kesepakatan yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian apakah ada objek kontraktual, jumlah besar atau kecil atau pokok dari kontrak. Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur terlarang dalam hukum Islam. Imam Al-Qarafi berpendapat bahwa *gharar* adalah seorang

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),h.147.2016),h.147.

yang tidak diketahui, apakah kontrak tersebut disimpulkan atau tidak, hanya membeli seekor ikan yang masih berada didalam dalam air.

Secara oprasional, *Gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek terkait transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.⁴⁷ Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (*sama sama ridha*) mereka harus mempunyai Informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu).

Secara *lughawi*, *gharar* dimaknai sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir*.⁴⁸ yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Dari pemaknaan ini, bisa dipahami bahwa *al-dunya mata' al-ghurur*, dunia adalah kesenangan yang menipu. Atas dasar makna yang dikandung oleh surat Al-imran ayat 185 ini, maka kemudian Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

Bentuk *gharar* di atas, kondisi yang sama yang secara suka rela dicapai bersifat sementara, yaitu, sementara kondisi belum jelas bagi kedua belah pihak. Dikemudian hari pada saat keadaannya telah jelas,

⁴⁷ Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah*, (Depok : Rajawali Pers,2015), h.116.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), h.3408.

salah satu pihak akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian.⁴⁹ *Gharar* adalah transaksi yang mengandung kebingungan atau ketidak pastian. *Gharar* berisi informasi yang tidak lengkap. dimana informasinya tidak lengkap diketahui hanya oleh satu pihak misalnya pembeli atau Penjual saja, dalam *gharar* informasi lengkap dari dua pihak, baik pembeli dan penjual. Dalam *gharar* maka ada ketidak pastian (kegelapan) antara dua pihak. Misalnya, membeli dan menjual ijon, membeli dan menjual sapi yang masih dalam ibu mereka, menjual ikan di kolam, dll.⁵⁰ Dalam *gharar* membeli dan menjual juga dalam empat hal: kualitas, kuantitas, harga dan waktu.

b). Bentuk Bentuk *Gharar*

Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi bila transaksi tersebut dijalankan. Islam sejak awal melarang transaksi demikian karena berpotensi mendzalimi salah satu pihak. Oleh sebab itu, misalnya dalam transaksi jual beli, Islam telah menetapkan beberapa syarat sah, yang tanpa salah satu syarat itu akan dapat membatalkan atau tidak sahnya jual beli.⁵¹ Diantaranya ditegaskan oleh Imam Nawawi:

- 1). Timbangan harus jelas, baik berat maupun jenis barang yang ditimbang.
- 2). Barang dan harga yang dijelas pula.

⁴⁹ Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah*, (Depok : Rajawali Pers,2015),h.171.

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers,2003),h.147.

⁵¹ Al-Imam al-Nawawi, *Sharh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, jil. 9, tt. h.210.

- 3). Memiliki waktu tangguh yang dimaklumi
- 4). Kedua belah pihak sama-sama ridha terhadap bisnis.

Melihat hadist larangan praktek gharar di atas, jelas bahwa dimana ada *gharar*, maka dapat merusak akad. Larangan *gharar* dalam Islam memiliki peran untuk menjamin keadilan. Ini bisa dilihat pada contoh-contoh klasik yang disebutkan ulama-ulama terdahulu. Misalnya, jual beli burung yang lagi terbang di udara. Meskipun secara fisik sehat dan ukurannya mungkin bisa diperkirakan. Demikian pula dengan jumlahnya. Tapi tidak ada jaminan apakah bisa diserahkan terimakan atau tidak. Seperti jual beli burung yang sedang tidak dalam penguasaan penjual, dapat mencederai kesempurnaan jual beli tersebut. Dalam kondisi seperti itu, pasti akan ada pihak yang dirugikan. Sedangkan, pihak lain untung.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu⁵² :

- a. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.57.

c. Berlebihan atau menggelembung.

Menurut Sayid Sabiq riba adalah *“Tambahan terhadap modal, sedikit maupun banyak.”*⁵³

Dengan demikian, riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad. Semua agama sama pada dasarnya melarang praktik riba, karena dapat menimbulkan dampak negative pada masyarakat umum dan bagi mereka yang terlibat. Adapun dampak negatif dari praktik riba dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat adalah:

- a. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
- b. Menyebabkan kebangkrutan usaha yang pada gilirannya menyebabkan keretakan rumah tangga jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya.
- c. Riba akan menimbulkan kemalasan berusaha karena pemilik modal menggantungkan pendapatan dari hasil bunga uang yang dipinjamkan.
- d. Memutuskan hubungan silaturahmi antara sesama manusia.
- e. Menyebabkan hati orang yang terlibat riba menjadi guncang, perasaannya tumpul dan pikirannya kusut.

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Dar Al-Fath, 2000), h. 123

semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negative yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.⁵⁴

2. Macam-Macam Riba

Macam-macam riba dan pengertiannya terbagi dalam dua kelompok besar :

a. Riba Utang Piutang (*Riba Duyun*)

Riba duyun adalah transaksi riba akibat utang piutang yang tidak memenuhi ketentuan syaria^h. Seperti adanya keuntungan bersama adanya resiko (*al ghunmu bil garmi*) dan adanya keuntungan karena adanya biaya atau modal (*al kharaj bin dhaman*). Di dalam riba duyun atau riba utang piutang ini terbagi dua macam riba, yaitu :

a). Riba *Qardh*

Riba qardh adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan diawal akad atau perjanjian utang piutang. Sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (*muqridh*) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima

⁵⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.243.

utang (muqtaridh). Contoh transaksi riba qardh dalam kehidupan sehari-hari masih sering ditemukan. Baik transaksi yang dilakukan oleh orang-perorangan, maupun lembaga keuangan. Praktik riba qardh yang sebaiknya dihindari.

b). Riba *Jahiliyah*

Riba jahiliyah adalah tambahan yang dipersyaratkan pada saat jatuh tempo pembayaran utang, sebagai kompensasi perpanjangan periode utang. Bedanya dengan riba qardh adalah pada waktu penetapan kewajiban kelebihan pengembalian utang. Praktik riba jahiliyah ini terus berlangsung hingga sekarang dalam kehidupan sehari-hari dari jaman dahulu hingga jaman sekarang.⁵⁵

c). Riba Jual Beli (Riba *Buyu'*)

Riba jual beli atau riba buyu" adalah jenis riba karena transaksi jual beli barang ribawi yang pertukaran barangnya tidak memenuhi kriteria sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Di dalam riba jual beli terbagi dua macam riba, yaitu :

1). Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenisnya. Dengan kata lain riba fadhl

⁵⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.246

merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Pada dasarnya, tukar menukar benda sejenis dibolehkan dalam Islam, dengan syarat harus sama ataupun sebanding antara kualitas dan kuantitasnya. Namun, bila disyaratkan ada nilai lebih dalam proses jual beli atau pinjam meminjam benda sejenis ini maka hal itu termasuk riba fadhl.

2). Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang. Riba *nasi'ah* ini merupakan praktik riba yang nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah utang orang yang berutang. Akhirnya, jumlah utangnya akan membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan karena mekanisme bunga berbunga.⁵⁶

3. Proses Pelanggaran Riba dalam Al-Qur'an

Islam melarang praktik riba dan memasukkannya dalam dosa besar.

Allah SWT dalam mengharamkan riba dilakukan melalui empat tahapan.

⁵⁶ *Ibid*, h.247.

Tahap Pertama, pada tahap ini Allah menunjukkan bahwa riba bersifat negative. Dalam QS. Ar-Rum [30:39] Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Disini Allah menolak anggapan bahwa pinjama riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Tahap Kedua, Allah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi. Hal ini ditegaskan dalam QS An-Nisa [4:161]. Dalam ayat ini riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang zalim dan batil. Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya.

Tahap Ketiga, pada tahap ini Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Sebagaimana digambarkan dalam QS. Al-Imran [3:130]. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

Tahap Keempat, pada tahap ini turun QS. Al-Baqarah [275-276, 278-279] yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas dan jelas, dalam berbagai bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika

ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.⁵⁷

4. Sebab-Sebab Haramnya Riba

Sebab-sebab riba diharamkan ada banyak. Berikut ini rincian sebab-sebab tersebut⁵⁸ :

- a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang (Al-Imran: 130)”

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Dan disebabkan mereka memakan riba, kami haramkan kepada mereka untuk mengambil, memakan, dan memanfaatkan barang riba (QS. An-Nisa: 161).”

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim)

- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya.

⁵⁷ Ibid, h. 248.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.58.

- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara". Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah.
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

5. Hal-Hal yang Menimbulkan Riba

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenisnya atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka di isyaratkan⁵⁹ :

- a. Sama nilainya (*tamasul*).
- b. Sama ukurannya menurut syara", baik timbangannya, takaran maupun ukurannya.
- c. Sama-sama tunai (*taqabuth*) dimajelis akad.

C. Potongan dan Denda

⁵⁹ *Ibid*, h.63

Potongan merupakan sebagai pengurangan (tentang, gaji, upah dan sebagainya).⁶⁰ Yang terdapat potongan dari uang yang dipinjam yang tidak jelas pada Aplikasi Kredit Pintar sehingga memicu mahasiswa merasa aneh dengan adanya potongan yang tidak jelas.

Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya).⁶¹ Denda digunakan untuk membuat efek jera kepada yang melanggar. Denda dikenakan kepada mahasiswa yang telah melewati jatuh tempo dan denda pula telah memberatkan mahasiwa.

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ebook)* (Jakarta: PusatBahasaDepdiknas, 2008), h. 35

⁶¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa indonesia (Ebook)* (Jakarta: PusatBahasaDediknas, 2008), h. 10.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

Abu Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor Hadist 1206, Maktabah Kutub, Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm, An-Nafi, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.

Q.S. Al-Baqarah (2):245

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..

Buku

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana, 2010.

Al-Jaziri, Abd. Rahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 2-3, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Qubra, 1970.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2014.

Alwi, Hasan Dan Sugono, Dendi. *Telaah Bahasa Dan Sastra*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2002.

Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hokum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015.

Chairuman Pasaribu, Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ebook)* Jakarta: PusatBahasaDepdiknas, 2008.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Syma, 2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Semarang: Ghalia Indonesia, 2012.

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Pradigma, 2007.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Khumedi Ja'far *Hukum Perdata Di Indonesia* Bandar Lampung Permatanet Publishing, 2016 .

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen* Universitas: Brawijaya Press, 2015.

M. Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

M Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Renika Cipta, 2015.

Moh Pabunda Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2000

Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Cv. Toha Putra, 1978.

Muhamad Pambundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009..

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Radial. *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.

R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Libanon: Darul Fikri, 1983.

Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung : Alfabeta, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung : Pusat penelitian dan penerbitan LP2M

Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2000.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami*, V/3792.

Jurnal

Mohammad Rusfi “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”, *Al-Adalah* vol 13 no 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016) h.254. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519> (22 Febuari 2021, pukul 20:30 WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Rachmawati, Eka Nuraini. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia.” *Al-Adalah*, vol 14 no 4 2015,

(Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015) h.786.(online),tersediadi
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (22 Febuari 2021, pukul 21:00 WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Syamsul Hilal “Transaksi Dalam Hukum Islam”, *Asas Muamalah* Vol 5 No 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2013) H.64 (On-Line), Tersedia di <https://doi.org/10.24042/asas.v5i2.1702> (03 maret 2021, Pukul 10:45 WIB) Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Wawancara

Wawancara Iqbal Mahasiswa angkatan 2016 sebagai peminjam dana di aplikasi kredit pintar pada tanggal 1 Febuari 2021.

Wawancara Teo Mahasiswa angkatan 2016 sebagai peminjam dana di aplikasi kredit pintar pada tanggal 2 Febuari 2021.

Wawancara Rendi Mahasiswa angkatan 2016 sebagai peminjam dana di aplikasi kredit pintar pada tanggal 2 Febuari 2021.

Wawancara Dila Mahasiswa angkatan 2016 sebagai peminjam dana di aplikasi kredit pintar pada tanggal 17 Febuari 2021.

Wawancara Riko Mahasiswa angkatan 2016 sebagai peminjam dana di aplikasi kredit pintar pada tanggal 18 Febuari 2021.

Wawancara Abdre sebagai Customer Service di aplikasi kredit pintar pada tanggal 5 Febuari 2021.

Sumber On-line

<https://www.online-pajak.com/pinjaman-online> (diakses pada 22 oktober 2019, pukul 09.00).

<https://m.liputan6.com/memahami-hak-kewajiban-kreditpintar/> pukul 18.00 WIB tanggal 15 febuari 2021

<https://fintech-lending-pinjam-meminjam-online-makin-menjamur/>, pukul 09.30, tanggal 16 febuari 2021.

<https://resiko-pinjaman-online/> pukul 19.00 WIB pada tanggal 17 febuari 2021.